

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi atau disebut otonomi daerah merupakan babak baru dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah, daerah dituntut untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki sebagai modal untuk pembangunan daerah tersebut. Tujuan pembangunan daerah itu tentunya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Dimana dalam setiap upaya pembangunan memiliki tujuan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan yang utama kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Hal tersebut harus dilakukan secara terencana dan terprogram disegala sektor maupun subsektor untuk meningkatkan pembangunan.

Salah satu indikasi dari pembangunan adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang ditunjukkan oleh pertambahan produksi atau pendapatan nasional. Keberhasilan pembangunan tersebut akan dapat mempertinggi kemampuan bangsa dalam perubahan di bidang lainnya. Dengan adanya arah kebijakan pembangunan seperti peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, penguatan pertanian dalam arti luas dan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta efisiensi belanja daerah, penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik dan pembangunan berwawasan lingkungan diharapkan dapat meningkatnya pendapatan daerah.

Salah satu tujuan pembangunan jangka panjang bidang pertumbuhan ekonomi yaitu terciptanya stabilitas ekonomi dibidang pertanian dan industri. Pertumbuhan sektor pertanian suatu daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh keunggulan kompetitif suatu daerah, spesialisasi wilayah serta potensi pertanian yang dimiliki oleh daerah tersebut. Adanya potensi pertanian disuatu daerah tidaklah mempunyai arti bagi pertumbuhan pertanian daerah tersebut bila

tidak ada upaya memanfaatkan dan mengembangkan potensi pertanian secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pengembangan seluruh potensi pertanian yang potensial harus menjadi prioritas utama untuk digali dan dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan pertanian daerah secara utuh.

Pertanian menjadi sektor strategis pembangunan di Provinsi Sumatera Barat karena potensi sumber daya pertanian yang melimpah di wilayah ini. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk ketahanan pangan masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Dimana subsektor tanaman pangan adalah yang terbesar dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian Provinsi Sumatera Barat yaitu 6,52% (Lampiran 1). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, sektor pertanian menyumbang terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 23,55 % ditahun 2017, kontribusinya terus mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu sebesar 24,99 % (Lampiran 2), meskipun laju pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat sektor pertanian mengalami peningkatan dari 2,01 % pada tahun 2016 menjadi 3,40 % pada tahun 2017 (Lampiran 3). Sementara itu ketersediaan lahan di Provinsi Sumatera Barat cukup luas untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan produksi tanaman pertanian dan kebutuhan lainnya yaitu sebesar 3.188.063 Ha atau 75,46% dari total lahan di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 4.225.223,9 Ha (Lampiran 4).

Salah satu penyumbang PDRB terbesar di Provinsi Sumatera Barat adalah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebesar 13.772.275,62 (Juta Rupiah) dengan urutan ke-5 (lampiran 5), dan laju pertumbuhan Kabupaten Lima Puluh Kota 5,34% (Lampiran 6). Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki luas wilayah 3.354,30 Km<sup>2</sup> (Lampiran 7) dengan pemanfaatan lahan pertanian 3.057,89 Km<sup>2</sup> atau 91,2% (Lampiran 8). Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian sangat berperan penting bagi pembangunan perekonomian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota mampu memperoleh PDRB lebih besar dan mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Pembangunan pertanian secara umum telah memberikan sumbangan besar dalam pembangunan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota baik langsung seperti

dalam pertumbuhan PDRB (Lampiran 5), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan penyediaan pangan, maupun tidak langsung melalui peningkatan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Program perencanaan pembangunan daerah disusun dengan sebaiknya dengan menetapkan sektor unggulan atau sektor basis khususnya sektor pertanian, sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah dapat dicapai dengan baik.

Sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota mampu menyerap tenaga kerja sebesar 48% atau 86.742 orang dari total jumlah penduduknya yaitu sebanyak 180.648 orang (Lampiran 9). Artinya sektor pertanian merupakan sektor vital dan sangat berpengaruh dalam pendapatan rumah tangga masyarakat dan angkatan kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kabupaten Lima Puluh Kota juga memiliki keuntungan komparatif pada potensi pertanian yang cukup menjanjikan, karena diiringi pula dengan potensi alam untuk tanaman pangan dengan iklim dan cuaca yang cukup baik serta keadaan tanah yang subur (Tarigan, 2005). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tarigan (2005), bahwa keunggulan komparatif merupakan suatu kondisi bagi suatu daerah atau negara yang memiliki komoditi yang lebih unggul secara relatif dibandingkan komoditi yang lain di daerahnya. Maka potensi suatu daerah seharusnya dapat dilihat untuk meningkatkan daya saing pertanian di pasar domestik dan internasional, serta perlu adanya peningkatan produktivitas dan efisiensi dalam pembangunan suatu komoditi.

Penetapan komoditi unggulan sektor pertanian daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dengan komoditi unggulan pada sub sektor perkebunannya adalah gambir, karena hampir 66% produksi gambir di Provinsi Sumatera Barat diproduksi oleh Kabupaten Lima Puluh Kota. Komoditi unggulan pada sub sektor pangan dan hortikultura adalah padi/beras, dimana produksinya terus meningkat dan membuat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu sentra produksi padi/beras di Provinsi Sumatera Barat. Namun masih ada beberapa kendala dalam subsektor pangan dan hortikultura di Kabupaten Lima Puluh Kota seperti komoditi jagung, dimana dalam kaitannya dengan perkembangan usaha peternakan unggas yang

cukup pesat, maka dibutuhkan pasokan jagung dalam jumlah besar. Sejauh ini kebutuhan jagung untuk pakan ternak masih didatangkan dari luar daerah dan produksinya sendiri cenderung menurun. Selain komoditi diatas masih banyak lagi komoditi dari Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat dijadikan komoditi unggulan. Untuk mengetahui komoditi mana yang dapat dijadikan komoditi unggulan maka terlebih dahulu harus dibandingkan dengan daerah lain, karena belum tentu komoditi yang dihasilkan oleh suatu daerah dengan jumlah yang besar akan menjadi unggulan daerah tersebut. Meskipun komoditas unggulan daerah sudah ada dalam RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota, namun belum ditentukan komoditi unggulan mana yang akan dijadikan prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan analisis Location Quotient dan Shift Share tidak hanya dapat menentukan komoditas unggulan saja tetapi juga dapat melihat atau menentukan komoditas unggulan mana yang dijadikan prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Oleh karena itu diperlukan juga untuk melihat program dan kegiatan pemerintah dalam pengembangan komoditi unggulan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan rencana dan kebijakan pembangunan pertanian, sehingga pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berjalan lebih efisien dan efektif, serta kontribusi sektor unggulan daerah tersebut, dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Komoditi Unggulan Sektor Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota?” dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Komoditi pertanian apa saja yang menjadi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah sesuai komoditi unggulan dengan komoditi pertanian yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Adakah program yang dilaksanakan terkait dengan perkembangan komoditi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat melakukan penelitian dengan judul “ Komoditi Unggulan Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota (*Analisis Location Quotient dan Shift Share Analysis*)”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menganalisis komoditi pertanian yang menjadi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menganalisis kesesuaian komoditi unggulan dengan komoditi pertanian yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Mengidentifikasi program yang dilaksanakan terkait dengan perkembangan komoditi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

### **D. Manfaat Peneletian**

Manfaat penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama dalam hal terkait potensi wilayah dengan pembangunan daerah serta sebagai referensi penelitian sejenis.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pembangunan dan dapat menjadi bahan pertimbangan atau pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terutama pada komoditi unggulan pertanian yang menjadi prioritas.